



Rencana Aksi Kolaboratif Menuju Pendidikan Tinggi dan Pekerjaan yang Inklusif

23 Januari 2025

Supported by



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Keterbatasan kesempatan & potensi diskriminasi terhadap disabilitas

- Menurut Komite Nasional Disabilitas (KND) pada tahun 2022, hanya 2,8 persen penyandang disabilitas yang dapat menikmati pendidikan tinggi.
- Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ada lebih dari 720.000 pekerja dengan disabilitas di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan peningkatan 160 persen dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 277.018 orang.
- Meski demikian, mayoritas pekerja dengan disabilitas di Indonesia adalah pekerja mandiri.
- Data tahun 2023 dari Australia-Indonesia *Disability Research and Advocacy Network* (AIDRAN) menunjukkan bahwa hanya 1 persen dari total populasi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal.

Konvensi internasional

- *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) – 2008*
- *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities – 2008*
- *ASEAN Declaration on the Rights of Persons with Disabilities – 2016*
- *ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities – 2018*

Peraturan perundang-undangan nasional

- UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 11 tahun 2020, No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Tantangan pelaksanaan peraturan

- Stigma masyarakat
- Keterbatasan pelaksanaan kebijakan
- Tantangan pada sosialisasi kebijakan & pembangunan kesadaran
- Keterbatasan pengetahuan kompleksitas disabilitas
- Keterbatasan pelaksanaan kebijakan disabilitas pada pendidikan tinggi & ketenagakerjaan

Model pelaksanaan inklusi disabilitas

Lembaga Pendidikan Tinggi

Pusat Layanan Disabilitas

UIN Sunan Kalijaga

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas

UNESA

*Gender Equality, Dissability,
& Social Inclusion*

UNU Yogyakarta

Transisi

Parakerja Disabilitas Bisa

Yayasan Mitra Netra

Pemberi Kerja

Microsoft Indonesia

Telkom Indonesia

MIND.ID

Rencana aksi kolaborasi

Peningkatan peraturan dan kebijakan

- **Memperkuat posisi strategis KND** dalam pemantauan, perencanaan, dan kapasitas pemerintahan terkait isu-isu disabilitas, terutama di sektor pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan.
- Mendorong pemerintah, dengan bantuan KND, untuk membuat **mekanisme pemantauan** bagi institusi pendidikan tinggi dan tempat kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan disabilitas yang ada.
- Memastikan bahwa **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi** mengintegrasikan akomodasi yang layak ke dalam **standar akreditasi** untuk institusi pendidikan tinggi, untuk mendukung inklusivitas.
- Membuat **kurikulum inklusif** oleh pemerintah, dengan bantuan dari KND, dalam rangka memastikan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas bagi penyandang disabilitas dan mempersiapkan mereka menempuh pendidikan lebih lanjut atau pekerjaan yang sesuai dengan kategori disabilitas mereka.
- Mendesak pemerintah, melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Ketenagakerjaan—dengan bantuan KND—untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan terkait disabilitas dengan menerapkan **insentif dan disinsentif** bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan.

Rencana aksi kolaborasi (2)

Kesadaran dan Pengembangan Kapasitas

- **Mendorong pemahaman yang jelas** mengenai peraturan perundang-undangan, mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016, kepada pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengundang para pemimpin daerah yang baru terpilih dari tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk menghadiri Kongres Nasional mengenai Disabilitas.
- Menekankan perlunya Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan bantuan KND, untuk **melakukan sosialisasi dan program penyadaran secara rutin** kepada para stakeholders untuk menjelaskan peraturan terkait disabilitas dan pentingnya peraturan tersebut di pendidikan tinggi dan tempat kerja.
- Mendorong penyusunan **buku panduan dan pedoman standar** oleh Kementerian Sosial dan KND, dengan masukan dari organisasi swasta dan masyarakat, untuk membantu para pemangku kepentingan dalam mematuhi peraturan terkait disabilitas.
- Menekankan perlunya **standarisasi bahasa isyarat** oleh Kementerian Sosial, bekerja sama dengan komunitas disabilitas, untuk memastikan keseragaman di lingkungan publik, pendidikan, dan tempat kerja.
- Mendorong **integrasi pemahaman yang kuat** mengenai disabilitas ke dalam budaya organisasi, pengadaan fasilitas fisik, dan langkah-langkah akomodasi lainnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, universitas, dan perusahaan.

Rencana aksi kolaborasi (3)

Program Kolaboratif dan Peluang Inklusi

- **Mendorong kemitraan kolaboratif antara KND, universitas, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Tinggi, perusahaan, dan masyarakat** untuk mempersiapkan penyandang disabilitas untuk bekerja melalui program transisi dari sekolah ke dunia kerja, mulai dari peningkatan keterampilan di sekolah hingga pendampingan, magang, dan penempatan kerja di tempat kerja yang inklusif.
- **Membangun platform data terpadu** antar pemerintah, universitas, LSM, masyarakat, dan dunia usaha dapat berbagi data mengenai hasil ketenagakerjaan, hambatan, dan praktik-praktik terbaik dalam mempekerjakan dan mendukung penyandang disabilitas. Kolaborasi ini akan menginformasikan kebijakan dan program yang berbasis bukti.
- **Mengeksplorasi mekanisme pendanaan yang inovatif** oleh para stakeholders di sektor pendidikan tinggi dan ketenagakerjaan, termasuk universitas, BUMN, dan perusahaan swasta, untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang inklusif bagi penyandang disabilitas, dengan penekanan pada pengembangan kapasitas profesional penyandang disabilitas dan menekankan nilai mereka di dalam konteks akademis dan profesional.

Thank you

Irvan Iswaraputra

E. irvan@tenggara.id

P. +62 812-2356-7594

W. www.tenggara.id

A. The Jakarta Post Building
Palmerah Barat 142-143,
Jakarta 10270

www.tenggara.id

Hosted By



Supported by



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

